

## KESEPAKATAN DUNIA UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT INFORMASI

*Pada akhir tahun 2003, di Jenewa, Swiss, telah diselenggarakan pertemuan puncak dunia membahas kesepakatan global untuk membangun masyarakat informasi yang inklusif. Mengingat pentingnya kesepakatan itu bagi Indonesia maka dalam terbitan BACA nomor ini dimuat deklarasi yang dihasilkan dan terjemahannya. Semoga bermanfaat.*

Diterjemahkan bersama oleh Tim Redaksi :  
Blasius Sudarsono, Sobari, Sugiharto,  
Tety Andriaty, Widhyastini

<p><b>Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E</b> <b>12 December 2003</b> <b>Original: English</b></p> <p><b>Declaration of Principles</b></p> <p><b>Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium</b></p> <p><b><i>A. Our Common Vision of the Information Society</i></b></p> <p>1. We, the representatives of the peoples of the world, assembled in Geneva from 10-12 December 2003 for the first phase of the World Summit on the Information Society, declare our common desire and commitment to build a people-centred, inclusive and development-oriented Information Society, where everyone can create, access, utilize and share information and knowledge,</p>	<p><b>Dokumen WSIS-03/Geneva/DOC/4-E</b> <b>12 Desember 2003</b> <b>Teks asli Bahasa Inggris</b></p> <p><b>Deklarasi Prinsip</b></p> <p><b>Membangun masyarakat informasi: tantangan global dalam milenium baru</b></p> <p><b><i>A. Visi bersama kami tentang masyarakat informasi</i></b></p> <p>1. Kami, perwakilan penduduk dunia, berkumpul di Jenewa pada 10-12 Desember 2003 untuk tahap pertama Pertemuan Puncak Dunia tentang Masyarakat Informasi, menyatakan keinginan dan kesanggupan bersama untuk membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan, di mana setiap orang dapat mencipta,</p>
--	--

enabling individuals, communities and peoples to achieve their full potential in promoting their sustainable development and improving their quality of life, premised on the purposes and principles of the Charter of the United Nations and respecting fully and upholding the Universal Declaration of Human Rights.

2. **Our challenge** is to harness the potential of information and communication technology to promote the development goals of the Millennium Declaration, namely the eradication of extreme poverty and hunger; achievement of universal primary education; promotion of gender equality and empowerment of women; reduction of child mortality; improvement of maternal health; to combat HIV/AIDS, malaria and other diseases; ensuring environmental sustainability; and development of global partnerships for development for the attainment of a more peaceful, just and prosperous world. We also reiterate our commitment to the achievement of sustainable development and agreed development goals, as contained in the Johannesburg Declaration and Plan of Implementation and the Monterrey Consensus, and other outcomes of relevant United Nations Summits.

mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan, hingga memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat mencapai seluruh potensi mereka untuk menggalakan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan mutu hidup mereka, berdasar tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menaati sepenuhnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2. Tantangan kita adalah pendayagunaan potensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendorong tujuan pembangunan Deklarasi Milenium, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar yang universal; mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; menurunkan mortalitas anak; meningkatkan kesehatan ibu; melawan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain; menjamin kelestarian lingkungan; dan membangun kemitraan global untuk pembangunan bagi pencapaian dunia yang lebih damai, tepat dan makmur. Kami juga menyatakan kembali kesanggupan kami untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan yang telah disepakati, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Johannesburg dan Rencana Penerapan dan Konsensus Moneter, dan berbagai hasil dari Pertemuan Puncak PBB lain yang terkait.

3. **We reaffirm** the universality, indivisibility, interdependence and interrelation of all human rights and fundamental freedoms, including the right to development, as enshrined in the Vienna Declaration. We also reaffirm that democracy, sustainable development, and respect for human rights and fundamental freedoms as well as good governance at all levels are interdependent and mutually reinforcing. We further resolve to strengthen respect for the rule of law in international as in national affairs.

4. **We reaffirm**, as an essential foundation of the Information Society, and as outlined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, that everyone has the right to freedom of opinion and expression; that this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Communication is a fundamental social process, a basic human need and the foundation of all social organization. It is central to the Information Society. Everyone, everywhere should have the opportunity to participate and no one should be excluded from the benefits the Information Society offers.

3. Kami menegaskan kembali universalitas, indivisibilitas, interdependensi dan interelasi semua hak asasi manusia dan kemerdekaan mendasar, termasuk hak pembangunan, seperti yang dilindungi dalam Deklarasi Wina. Kami juga menguatkan kembali bahwa demokrasi, pembangunan berkelanjutan, dan penghormatan atas hak asasi manusia dan kemerdekaan mendasar seperti juga pemerintahan yang bersih pada setiap tingkat adalah saling tergantung dan saling menguatkan. Kami memutuskan untuk lebih menghormati aturan hukum internasional seperti juga dalam permasalahan nasional.

4. Kami menegaskan kembali, sebagai landasan utama masyarakat informasi, dan seperti di jelaskan dalam Artikel 19 dari Deklarasi Hak Asasi manusia, bahwa semua orang memiliki kemerdekaan menyatakan pendapat, bahwa hak ini mencakup kemerdekaan untuk berpendapat tanpa interferensi dan untuk mencari, menerima dan menyatakan informasi, ide melalui berbagai media dan tanpa memandang batas wilayah (negara). Komunikasi merupakan dasar proses sosial, merupakan kebutuhan dasar manusia dan landasan dari semua organisasi sosial. Ini merupakan yang utama dalam masyarakat informasi. Setiap orang, dimanapun berada harus mempunyai peluang untuk berpartisipasi dan tidak seorangpun dikecualikan dari manfaat

<p>5. <b>We further reaffirm</b> our commitment to the provisions of Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights, that everyone has duties to the community in which alone the free and full development of their personality is possible, and that, in the exercise of their rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. In this way, we shall promote an Information Society where human dignity is respected.</p> <p>6. In keeping with the spirit of this declaration, <b>we rededicate ourselves</b> to upholding the principle of the sovereign equality of all States.</p> <p>7. <b>We recognize</b> that science has a central role in the development of the Information Society. Many of the building blocks of the Information Society are the result of scientific and technical advances made possible by the sharing of research results.</p>	<p>yang dihasilkan oleh masyarakat informasi.</p> <p>5. Kami lebih menegaskan kembali kesanggupan kami memenuhi Artikel 29 dari Deklarasi Universal atas Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang mempunyai kewajiban kepada komunitas yang dengan sendirinya memungkinkan kemerdekaan dan pengembangan kepribadian mereka, oleh karena itu dalam mencapai hak dan kemerdekaannya setiap orang hanya dibatasi oleh undang-undang yang menjamin hak dan kemerdekaan pihak lain dan untuk memenuhi ketentuan moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan dasar dalam masyarakat demokrasi. Hak dan kemerdekaan tidak boleh bertentangan pada tujuan dan prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini kita harus mendorong Masyarakat Informasi yang menghormati kepribadian manusia.</p> <p>6. Dalam menjaga semangat deklarasi ini, kami mengulang dedikasi kami untuk menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kedaulatan setiap negara.</p> <p>7. Kami memahami bahwa ilmu pengetahuan memiliki peran sentral dalam pembangunan masyarakat informasi. Banyak bagian bangunan Masyarakat Informasi merupakan hasil dari ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknis dimungkinkan karena berbagi hasil penelitian.</p>
--	---

8. We **recognize** that education, knowledge, information and communication are at the core of human progress, endeavour and well-being. Further, Information and Communication Technologies (ICTs) have an immense impact on virtually all aspects of our lives. The rapid progress of these technologies opens completely new opportunities to attain higher levels of development. The capacity of these technologies to reduce many traditional obstacles, especially those of time and distance, for the first time in history makes it possible to use the potential of these technologies for the benefit of millions of people in all corners of the world.

9. We **are aware** that ICTs should be regarded as tools and not as an end in themselves. Under favourable conditions, these technologies can be a powerful instrument, increasing productivity, generating economic growth, job creation and employability and improving the quality of life of all. They can also promote dialogue among people, nations and civilizations.

10. We **are also fully aware** that the benefits of the information technology revolution are today unevenly distributed between the developed and developing countries and within societies. We are fully committed to turning this

8. Kami memahami bahwa pendidikan, pengetahuan, informasi dan komunikasi merupakan inti dari perkembangan, usaha dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki dampak besar secara virtual atas seluruh aspek kehidupan kita. Kecepatan perkembangan teknologi ini membuka sepenuhnya peluang baru untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Kemampuan teknologi ini untuk mengurangi banyaknya hambatan tradisional, khususnya yang berhubungan dengan waktu dan jarak, memungkinkan penggunaan potensi teknologi ini untuk pertama kali dalam sejarah bagi keuntungan jutaan manusia di segala penjuru dunia.

9. Kami menyadari bahwa TIK harus dipandang sebagai sarana dan bukannya sebagai tujuan akhir. Dalam kondisi yang baik, teknologi ini dapat menjadi sarana yang sangat mampu, meningkatkan produktivitas, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan mutu hidup bagi semuanya. Juga dapat mendorong dialog antar manusia, negara, dan peradaban.

10. Kami juga sepenuhnya menyadari bahwa keuntungan dari revolusi teknologi informasi pada saat sekarang tidaklah terdistribusi merata antara negara maju dan negara berkembang, dan dalam masyarakat. Kami sepenuhnya sanggup

digital divide into a digital opportunity for all, particularly for those who risk being left behind and being further marginalized.

11. **We are committed** to realizing our common vision of the Information Society for ourselves and for future generations. We recognize that young people are the future workforce and leading creators and earliest adopters of ICTs. They must therefore be empowered as learners, developers, contributors, entrepreneurs and decision-makers. We must focus especially on young people who have not yet been able to benefit fully from the opportunities provided by ICTs. We are also committed to ensuring that the development of ICT applications and operation of services respects the rights of children as well as their protection and well-being.

12. **We affirm** that development of ICTs provides enormous opportunities for women, who should be an integral part of, and key actors, in the Information Society. We are committed to ensuring that the Information Society enables women's empowerment and their full participation on the basis on equality in all spheres of society and in all decision-making processes. To this end, we should mainstream a gender equality perspective and use ICTs as a tool to that end.

untuk mengubah pemisah digital ini menjadi peluang digital untuk semua orang, khususnya bagi mereka yang berisiko untuk ditinggal dan lebih dipinggirkan.

11. Kami sanggup untuk mewujudkan visi bersama kami tentang masyarakat informasi, bagi diri kami sendiri dan generasi mendatang. Kami memahami bahwa kaum muda adalah tenaga kerja masa depan, pelopor pencipta dan pengguna TIK. Mereka harus diberdayakan sebagai pembelajar, pengembang, kontributor, entrepreneur, dan pengambil keputusan. Kita harus memfokuskan pada kaum muda khususnya yang belum mendapat manfaat sepenuhnya dari peluang yang diberikan TIK. Kita juga sanggup menjamin bahwa pengembangan aplikasi dan pengoperasian TIK menghormati hak asasi, perlindungan dan kesejahteraan anak.

12. Kami menegaskan bahwa perkembangan TIK memberikan peluang besar pada kaum perempuan yang harus menjadi bagian integral dan aktor kunci dalam masyarakat informasi. Kami bertekad menjamin bahwa masyarakat informasi memungkinkan pemberdayaan perempuan dan partisipasi penuh mereka berdasarkan kesetaraan dalam semua lapisan masyarakat dan dalam semua proses pengambilan keputusan. Untuk tujuan ini kita harus mengarusutamakan perspektif kesetaraan gender dan menggunakan TIK sebagai sarana untuk mencapainya.

<p>13. In building the Information Society, <b>we shall pay particular attention</b> to the special needs of marginalized and vulnerable groups of society, including migrants, internally displaced persons and refugees, unemployed and underprivileged people, minorities and nomadic people. We shall also recognize the special needs of older persons and persons with disabilities.</p>	<p>13. Dalam membangun masyarakat informasi, kita harus lebih memberikan perhatian pada kebutuhan khusus kelompok terpinggirkan dan lemah dalam masyarakat, termasuk migran, orang tersisih dan pengungsi, pengangguran, orang miskin, minoritas, dan orang nomad. Kita juga harus memahami kebutuhan khusus orang tua dan penyandang cacat.</p>
<p>14. <b>We are resolute</b> to empower the poor, particularly those living in remote, rural and marginalized urban areas, to access information and to use ICTs as a tool to support their efforts to lift themselves out of poverty.</p>	<p>14. Kami berniat teguh untuk memberdayakan orang miskin, khususnya yang hidup di tempat jauh, pedesaan dan daerah pinggiran kota, untuk mengakses informasi dan menggunakan TIK sebagai sarana pendukung upaya mereka mengentaskan diri dari kemiskinan.</p>
<p>15. In the evolution of the Information Society, particular attention must be given to the special situation of indigenous peoples, as well as to the preservation of their heritage and their cultural legacy.</p>	<p>15. Dalam evolusi masyarakat informasi, perhatian harus diberikan lebih kepada kondisi khusus pribumi, demikian juga dengan pelestarian warisan dan budaya mereka.</p>
<p>16. <b>We continue to pay special attention</b> to the particular needs of people of developing countries, countries with economies in transition, Least Developed Countries, Small Island Developing States, Landlocked Developing Countries, Highly Indebted Poor Countries, countries and territories under occupation, countries recovering from conflict and countries and regions with special needs as well as to conditions that</p>	<p>16. Kami terus memberikan perhatian khusus pada kebutuhan khusus penduduk di negara berkembang, negara yang mengalami transisi ekonomi, negara kurang berkembang, negara kepulauan kecil, negara berkembang tanpa laut, negara miskin berhutang besar, negara atau teritori dalam penjajahan, negara yang baru bangkit dari konflik dan negara atau daerah dengan kebutuhan khusus, juga pada kondisi yang</p>

pose severe threats to development, such as natural disasters.

17. **We recognize** that building an inclusive Information Society requires new forms of solidarity, partnership and cooperation among governments and other stakeholders, i.e. the private sector, civil society and international organizations. Realizing that the ambitious goal of this Declaration—bridging the digital divide and ensuring harmonious, fair and equitable development for all—will require strong commitment by all stakeholders, we call for digital solidarity, both at national and international levels.

18. Nothing in this Declaration shall be construed as impairing, contradicting, restricting or derogating from the provisions of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, any other international instrument or national laws adopted in furtherance of these instruments.

***B. An Information Society for All:  
Key Principles***

19. **We are resolute** in our quest to ensure that everyone can benefit from the opportunities that ICTs can offer. We agree that to meet these challenges, all stakeholders should work together to: improve access to information and communication infrastructure and

mengancam, seperti bencana alam.

17. Kami memahami bahwa membangun masyarakat informasi inklusif memerlukan bentuk baru solidaritas, kemitraan, dan kerja sama di antara pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya, yaitu sektor swasta, masyarakat sipil dan organisasi internasional. Menyadari bahwa tujuan besar deklarasi ini menjembatani pemisahan digital dan menjamin pembangunan yang adil, merata dan harmonis untuk semuanya akan menuntut kesanggupan kuat dari seluruh pihak berkepentingan, kami menyerukan solidaritas digital, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

18. Tiada dalam dokumen ini yang diartikan melemahkan, berlawanan, membatasi atau mengurangi kesiagaan atas Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta setiap instrumen internasional atau hukum nasional yang diadopsi sebagai dukungan dari instrumen ini.

***B. Suatu masyarakat informasi  
untuk semuanya: prinsip kunci.***

19. Kami bertekad dalam pencarian kami untuk menjamin bahwa setiap orang mendapatkan manfaat dari peluang yang diberikan TIK. Kami setuju bahwa untuk menghadapi tantangan ini, semua pihak berkepentingan harus bekerja bersama untuk



technologies as well as to information and knowledge; build capacity; increase confidence and security in the use of ICTs; create an enabling environment at all levels; develop and widen ICT applications; foster and respect cultural diversity; recognize the role of the media; address the ethical dimensions of the Information Society; and encourage international and regional cooperation. We agree that these are the key principles for building an inclusive Information Society.

**1) The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development**

20. Governments, as well as private sector, civil society and the United Nations and other international organizations have an important role and responsibility in the development of the Information Society and, as appropriate, in decision-making processes. Building a people-centred Information Society is a joint effort which requires cooperation and partnership among all stakeholders.

**2) Information and communication infrastructure: an essential foundation for an inclusive information society**

meningkatkan akses pada sarana informasi, komunikasi dan teknologi seperti juga akses informasi dan pengetahuan; membangun kemampuan; meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam menggunakan TIK; menciptakan pada setiap tingkat lingkungan yang memungkinkan; mengembangkan dan meluaskan penerapan TIK; menjaga dan menghormati perbedaan budaya; memahami peran media; menekankan dimensi etis masyarakat informasi; serta mendorong kerja sama internasional dan regional. Kami sepakat bahwa semua itu adalah prinsip kunci dalam membangun masyarakat informasi inklusif.

**1) Peran pemerintah, pihak berkepentingan dalam mendorong penggunaan TIK dalam pembangunan.**

20. Pemerintah, seperti juga sektor swasta, masyarakat sipil dan PBB serta organisasi internasional lainnya mempunyai peran dan tanggung jawab penting dalam membangun masyarakat informasi secara tepat dalam proses pengambilan keputusan. Membangun masyarakat informasi yang berpusat pada manusia merupakan usaha bersama yang memerlukan kerja sama, kemitraan antar pihak berkepentingan.

**2) Sarana informasi dan komunikasi: landasan utama bagi masyarakat informasi inklusif**

21.Connectivity is a central enabling agent in building the Information Society. Universal, ubiquitous, equitable and affordable access to ICT infrastructure and services, constitutes one of the challenges of the Information Society and should be an objective of all stakeholders involved in building it. Connectivity also involves access to energy and postal services, which should be assured in conformity with the domestic legislation of each country.

22.A well-developed information and communication network infrastructure and applications, adapted to regional, national and local conditions, easily-accessible and affordable, and making greater use of broadband and other innovative technologies where possible, can accelerate the social and economic progress of countries, and the well-being of all individuals, communities and peoples.

23.Policies that create a favourable climate for stability, predictability and fair competition at all levels should be developed and implemented in a manner that not only attracts more private investment for ICT infrastructure development but also enables universal service obligations to be met in areas where traditional market conditions fail to work. In disadvantaged areas, the establishment of ICT public access

21.Ketersambungan merupakan hal sentral yang memungkinkan pembangunan masyarakat informasi. Akses universal, ada dimanamana, tepat dan terjangkau pada sarana dan layanan TIK, merupakan salah satu tantangan dalam masyarakat informasi dan harus menjadi tujuan dari semua pihak berkepentingan yang ikut dalam pembangunan MI. Ketersambungan meliputi juga akses pada jasa daya dan pos yang harus dijamin selaras dengan peraturan di setiap negara.

22.Sarana dan penerapan jaringan informasi dan komunikasi yang dikembangkan secara tepat yang beradaptasi dengan kondisi lokal, nasional dan regional, akses mudah dan terjangkau, dan apabila dimungkinkan menggunakan lebih banyak pita lebar dan inovasi teknologi lainnya, dapat mempercepat perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan individu, komunitas, dan penduduk dari suatu negara.

23.Kebijakan yang menciptakan suasana mendukung stabilitas, prediktabilitas dan kompetisi sehat pada setiap tingkat harus dikembangkan dan diterapkan dalam situasi yang tidak hanya menarik lebih banyak investasi swasta bagi pengembangan sarana TIK tetapi juga memungkinkan kewajiban layanan universal terpenuhi di daerah di mana layanan pasar tradisional gagal bekerja. Di daerah yang kurang

points in places such as post offices, schools, libraries and archives, can provide effective means for ensuring universal access to the infrastructure and services of the Information Society.

### 3) Access to information and knowledge

24. The ability for all to access and contribute information, ideas and knowledge is essential in an inclusive Information Society.

25. The sharing and strengthening of global knowledge for development can be enhanced by removing barriers to equitable access to information for economic, social, political, health, cultural, educational, and scientific activities and by facilitating access to public domain information, including by universal design and the use of assistive technologies.

26. A rich public domain is an essential element for the growth of the Information Society, creating multiple benefits such as an educated public, new jobs, innovation, business opportunities, and the advancement of sciences. Information in the public domain should be easily accessible to support the Information Society, and protected from misappropriation. Public institutions such

menguntungkan, pembangunan layanan TIK untuk akses umum seperti di kantor pos, perpustakaan dan kantor arsip, dapat memberikan sarana efektif yang menjamin akses universal pada sarana dan layanan masyarakat informasi.

### 3) Akses pada informasi dan pengetahuan

24. Kemampuan bagi semua untuk mengakses dan menyumbang informasi, ide, dan pengetahuan merupakan hal yang mendasar dalam masyarakat informasi inklusif.

25. Saling berbagi dan penguatan pengetahuan global untuk pembangunan dapat ditingkatkan dengan menghilangkan hambatan pada akses informasi yang tepat untuk kegiatan ekonomi, sosial, politik, kesehatan, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, serta dengan memfasilitasi akses pada informasi publik termasuk rancangan universal dan penggunaan teknologi yang membantu.

26. Area umum yang kaya merupakan elemen mendasar bagi pertumbuhan masyarakat informasi, menciptakan manfaat ganda seperti publik yang terdidik, pekerjaan baru, inovasi, peluang bisnis, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Informasi publik harus mudah terakses untuk mendukung masyarakat informasi, dan dilindungi dari ketidaktepatan. Institusi publik seperti

as libraries and archives, museums, cultural collections and other community-based access points should be strengthened so as to promote the preservation of documentary records and free and equitable access to information.

27. Access to information and knowledge can be promoted by increasing awareness among all stakeholders of the possibilities offered by different software models, including proprietary, open source and free software, in order to increase competition, access by users, diversity of choice, and to enable all users to develop solutions which best meet their requirements. Affordable access to software should be considered as an important component of a truly inclusive Information Society.

28. We strive to promote universal access with equal opportunities for all to scientific knowledge and the creation and dissemination of scientific and technical information, including open access initiatives for scientific publishing.

#### 4) Capacity building

29. Each person should have the opportunity to acquire the necessary skills and knowledge in order to understand, participate actively in, and benefit fully from, the Information Society and the knowledge economy. Literacy and

perpustakaan dan arsip, museum, koleksi budaya dan fasilitas akses publik lainnya harus dikuatkan untuk mendorong pelestarian rekaman dokumenter dan akses informasi yang bebas dan merata.

27. Akses informasi dan pengetahuan dapat didorong dengan meningkatkan kesadaran semua pihak berkepentingan atas kemungkinan yang diberikan oleh model peranti lunak yang berbeda, termasuk peranti lunak bebas, dalam rangka meningkatkan kompetisi, akses pemakai, keanekaragaman pilihan, dan untuk memungkinkan semua pengguna mengembangkan solusi yang memenuhi persyaratan mereka. Akses terjangkau atas peranti lunak harus dipertimbangkan sebagai komponen penting dari masyarakat informasi inklusif yang benar.

28. Kami berjuang untuk mendorong akses universal dengan peluang sama untuk semua ilmu pengetahuan dan penciptaan serta diseminasi informasi ilmiah dan teknis, termasuk inisiatif akses terbuka pada publikasi ilmiah.

#### 4) Pengembangan kemampuan

29. Setiap orang harus mempunyai peluang untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, berpartisipasi aktif, dan mendapatkan manfaat penuh dari masyarakat informasi dan

universal primary education are key factors for building a fully inclusive information society, paying particular attention to the special needs of girls and women. Given the wide range of ICT and information specialists required at all levels, building institutional capacity deserves special attention.

30. The use of ICTs in all stages of education, training and human resource development should be promoted, taking into account the special needs of persons with disabilities and disadvantaged and vulnerable groups.

31. Continuous and adult education, re-training, life-long learning, distance-learning and other special services, such as telemedicine, can make an essential contribution to employability and help people benefit from the new opportunities offered by ICTs for traditional jobs, self-employment and new professions. Awareness and literacy in ICTs are an essential foundation in this regard.

32. Content creators, publishers, and producers, as well as teachers, trainers, archivists, librarians and learners, should play an active role in promoting the Information Society, particularly in the Least

perekonomian pengetahuan. Kemelekan huruf dan pendidikan dasar universal merupakan faktor kunci dalam membangun masyarakat informasi inklusif yang memberi perhatian khusus pada kebutuhan gadis dan perempuan. Mengingat rentang lebar TIK dan spesialis informasi diperlukan pada tiap tingkat, pengembangan kemampuan institusi menuntut perhatian khusus.

30. Penggunaan TIK pada tiap jenjang pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia harus selalu didorong, khususnya dengan memperhatikan orang cacat dan kelompok yang dirugikan dan lemah.

31. Pendidikan lanjutan dan pendidikan orang dewasa, pelatihan kembali, pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran jarak jauh dan layanan khusus lainnya, seperti pengobatan jarak jauh, dapat memberi kontribusi penting untuk ketenagakerjaan dan membantu orang-orang mengambil manfaat dari kesempatan baru yang ditawarkan TIK untuk pekerjaan tradisional, tenaga kerja mandiri dan landasan profesi baru, kesadaran dan kemampuan baca tulis dalam TIK merupakan hal pokok dalam pandangan ini.

32. Pencipta isi, penerbit dan produser, seperti pengajar, pelatih, arsiparis, pustakawan dan pembelajar, seharusnya memainkan peranan aktif dalam mempromosikan masyarakat informasi,

<p>Developed Countries.</p>	<p>terutama di negara-negara miskin.</p>
<p>33. To achieve a sustainable development of the Information Society, national capability in ICT research and development should be enhanced. Furthermore, partnerships, in particular between and among developed and developing countries, including countries with economies in transition, in research and development, technology transfer, manufacturing and utilization of ICT products and services are crucial for promoting capacity building and global participation in the Information Society. The manufacture of ICTs presents a significant opportunity for creation of wealth.</p>	<p>33. Untuk mencapai pembangunan masyarakat informasi yang berkelanjutan, kemampuan nasional dalam penelitian dan pengembangan TIK seharusnya ditingkatkan. Selain itu, kemitraan, termasuk negara-negara dengan transisi ekonomi, penelitian dan pengembangan, alih teknologi, pembuatan dan penggunaan produk dan layanan TIK merupakan hal krusial untuk promosi pengembangan kecakapan dan peran serta global dalam masyarakat informasi. Pembuatan TIK menghadirkan kesempatan yang berarti untuk mewujudkan kemakmuran.</p>
<p>34. The attainment of our shared aspirations, in particular for developing countries and countries with economies in transition, to become fully-fledged members of the Information Society, and their positive integration into the knowledge economy, depends largely on increased capacity building in the areas of education, technology, know-how and access to information, which are major factors in determining development and competitiveness.</p>	<p>34. Pencapaian cita-cita bersama kita, terutama untuk negara sedang berkembang dan negara dengan transisi ekonomi, untuk menjadi anggota yang sepenuhnya berpengalaman dari masyarakat informasi, dan integrasi positif mereka ke dalam ekonomi pengetahuan, sebagian besar bergantung kepada peningkatan pengembangan kecakapan dalam wilayah pendidikan, teknologi, pengetahuan dasar dan akses informasi merupakan faktor utama dalam penentuan pembangunan dan daya saing.</p>
<p><b>5) Building confidence and security in the use of ICTs</b></p>	<p><b>5). Pengembangan kepercayaan dan keamanan dalam pemanfaatan TIK</b></p>
<p>35. Strengthening the trust framework, including information security and</p>	<p>35. Penguatan bingkai kepercayaan, termasuk keamanan informasi dan</p>

network security, authentication, privacy and consumer protection, is a prerequisite for the development of the Information Society and for building confidence among users of ICTs. A global culture of cybersecurity needs to be promoted, developed and implemented in cooperation with all stakeholders and international expert bodies. These efforts should be supported by increased international cooperation. Within this global culture of cybersecurity, it is important to enhance security and to ensure the protection of data and privacy, while enhancing access and trade. In addition, it must take into account the level of social and economic development of each country and respect the development-oriented aspects of the Information Society.

36. While recognizing the principles of universal and non-discriminatory access to ICTs for all nations, we support the activities of the United Nations to prevent the potential use of ICTs for purposes that are inconsistent with the objectives of maintaining international stability and security, and may adversely affect the integrity of the infrastructure within States, to the detriment of their security. It is necessary to prevent the use of information resources and technologies for criminal and terrorist purposes, while respecting human rights.

jaringan, pengesahan, perlindungan kerahasiaan dan konsumen, merupakan syarat mutlak untuk pembangunan masyarakat informasi dan pengembangan kepercayaan di antara pengguna TIK. Budaya global tentang keamanan dunia maya perlu dipromosikan, dikembangkan dan diterapkan dalam kerja sama dengan semua pihak berkepentingan dan dewan pakar internasional. Dalam budaya global keamanan dunia maya ini, merupakan hal penting untuk meningkatkan keamanan dan menjamin perlindungan data dan kerahasiaan, seiring dengan peningkatan akses dan perdagangan. Sebagai tambahan, harus dipertimbangkan tingkat pembangunan sosial dan ekonomi tiap negara dan menghormati aspek berorientasi pembangunan dari masyarakat informasi.

36. Selain mengakui prinsip akses universal dan nondiskriminasi pada TIK untuk semua bangsa, kami mendukung kegiatan Persekitaran Bangsa-Bangsa untuk mencegah potensi penggunaan TIK yang tidak sesuai dengan tujuan pemeliharaan stabilitas dan keamanan internasional, dan mungkin memberikan pengaruh merugikan pada keutuhan infrastruktur negara yang mengganggu keamanan. Hal ini perlu untuk mencegah penggunaan sumber daya informasi dan teknologi untuk tujuan kejahatan dan teroris, seiring dengan dihormatinya hak asasi manusia.

37. Spam is a significant and growing problem for users, networks and the Internet as a whole. Spam and cyber-security should be dealt with at appropriate national and international levels.

#### 6) Enabling environment

38. An enabling environment at national and international levels is essential for the Information Society. ICTs should be used as an important tool for good governance.

39. The rule of law, accompanied by a supportive, transparent, pro-competitive, technologically neutral and predictable policy and regulatory framework reflecting national realities, is essential for building a people-centred Information Society. Governments should intervene, as appropriate, to correct market failures, to maintain fair competition, to attract investment, to enhance the development of the ICT infrastructure and applications, to maximize economic and social benefits, and to serve national priorities.

40. A dynamic and enabling international environment, supportive of foreign direct investment, transfer of technology, and international cooperation, particularly in the

37. Spam menjadi masalah berarti dan terus tumbuh bagi pengguna jaringan dan internet secara keseluruhan. Spam dan keamanan dunia maya harus ditanggulangi pada tingkat nasional dan internasional yang cocok.

#### 6). Lingkungan yang memungkinkan

38. Lingkungan yang memungkinkan pada tingkat nasional dan internasional merupakan hal pokok untuk masyarakat informasi. TIK harus digunakan sebagai sarana penting untuk pemerintahan yang baik.

39. Peraturan perundangan dilengkapi dengan kebijakan yang mendukung, transparan, berdaya saing, secara teknologi netral, serta kebijakan terkira dan kerangka peraturan yang mencerminkan kenyataan nasional merupakan hal pokok untuk membangun masyarakat informasi yang berpusat pada orang. Pemerintah harus mengintervensi saat diperlukan, untuk: mengoreksi kegagalan pasar, menjaga persaingan sehat, menarik investasi, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penerapan TIK, memperbesar keuntungan ekonomi dan sosial, dan untuk melayani prioritas nasional.

40. Lingkungan internasional yang dinamis dan memungkinkan, mendukung investasi: luar negeri secara langsung, transfer teknologi, dan kerja sama internasional,



areas of finance, debt and trade, as well as full and effective participation of developing countries in global decision-making, are vital complements to national development efforts related to ICTs. Improving global affordable connectivity would contribute significantly to the effectiveness of these development efforts.

41. ICTs are an important enabler of growth through efficiency gains and increased productivity, in particular by small and medium sized enterprises (SMEs). In this regard, the development of the Information Society is important for broadly-based economic growth in both developed and developing economies. ICT-supported productivity gains and applied innovations across economic sectors should be fostered. Equitable distribution of the benefits contributes to poverty eradication and social development. Policies that foster productive investment and enable firms, notably SMEs, to make the changes needed to seize the benefits from ICTs, are likely to be the most beneficial.

42. Intellectual Property protection is important to encourage innovation and creativity in the Information Society; similarly, the wide dissemination, diffusion, and

terutama dalam bidang keuangan, hutang dan perdagangan, seperti juga partisipasi penuh dan efektif dari negara berkembang dalam pengambilan keputusan global, merupakan pelengkap yang penting bagi upaya pembangunan nasional yang terkait dengan TIK. Meningkatkan konektivitas global yang terjangkau jelas akan menyumbang efektivitas upaya pengembangan tersebut.

41. TIK adalah penopang penting pertumbuhan melalui efisiensi dan peningkatan produktivitas, khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah. Dalam hal ini, perkembangan masyarakat informasi menjadi penting untuk pertumbuhan ekonomi secara luas baik bagi ekonomi maju maupun sedang berkembang. Pencapaian produktivitas akibat dukungan TIK dan penerapan inovasi antar sektor ekonomi perlu dipelihara. Distribusi keuntungan yang merata menyumbang penghapusan kemiskinan dan perkembangan sosial. Kebijakan yang membina investasi produktif dan perusahaan yang mampu, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) untuk membuat perubahan yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan dari TIK, akan menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan.

42. Perlindungan kekayaan intelektual merupakan hal penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat informasi; seperti juga penyebaran,

sharing of knowledge is important to encourage innovation and creativity. Facilitating meaningful participation by all in intellectual property issues and knowledge sharing through full awareness and capacity building is a fundamental part of an inclusive Information Society.

43. Sustainable development can best be advanced in the Information Society when ICT-related efforts and programmes are fully integrated in national and regional development strategies. We welcome the New Partnership for Africa's Development (NEPAD) and encourage the international community to support the ICT-related measures of this initiative as well as those belonging to similar efforts in other regions. Distribution of the benefits of ICT-driven growth contributes to poverty eradication and sustainable development.

44. Standardization is one of the essential building blocks of the Information Society. There should be particular emphasis on the development and adoption of international standards. The development and use of open, interoperable, non-discriminatory and demand-driven standards that take into account needs of users and consumers is a basic element for the development and greater

difusi, dan berbagai pengetahuan adalah penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Fasilitasi keikutsertaan berarti oleh semua pihak dalam isu kekayaan intelektual dan berbagi pengetahuan melalui kesadaran penuh dan pengembangan kemampuan menjadi bagian mendasar dari Masyarakat Informasi yang inklusif.

43. Pembangunan berkelanjutan dapat sepenuhnya dikembangkan dalam masyarakat informasi apabila upaya dan program terkait dengan TIK terintegrasi secara penuh dalam strategi pembangunan nasional dan regional. Kami menyambut baik adanya New Partnership for Africa's Development (NEPAD) dan mendorong masyarakat internasional untuk mendukung pertimbangan yang terkait TIK dari inisiatif tersebut seperti juga yang menjadi bagian dari upaya sejenis di wilayah lain. Distribusi manfaat dari pertumbuhan yang digerakkan oleh TIK membantu penghapusan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

44. Standardisasi merupakan bagian penting dari bangun masyarakat informasi. Harus ada upaya khusus dalam mengembangkan dan mengadopsi standar internasional. Pengembangan dan penggunaan standar yang terbuka, saling dapat dioperasikan, non-diskriminasi dan sesuai kebutuhan yang memperhatikan kebutuhan pemakai dan konsumen adalah elemen dasar untuk pengembang-

<p>diffusion of ICTs and more affordable access to them, particularly in developing countries. International standards aim to create an environment where consumers can access services worldwide regardless of underlying technology.</p>	<p>an dan difusi TIK secara lebih luas serta akses yang terjangkau, terutama di negara berkembang. Standar internasional bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan di mana para konsumen dapat mengakses layanan di seluruh dunia tanpa mempertimbangkan teknologi yang digunakan.</p>
<p>45.The radio frequency spectrum should be managed in the public interest and in accordance with principle of legality, with full observance of national laws and regulation as well as relevant international agreements.</p>	<p>45.Spektrum frekuensi radio sebaiknya diatur untuk kebutuhan publik dan sesuai dengan prinsip legalitas dengan mentaati secara penuh peraturan dan hukum nasional termasuk persetujuan internasional yang relevan.</p>
<p>46.In building the Information Society, States are strongly urged to take steps with a view to the avoidance of, and refrain from, any unilateral measure not in accordance with international law and the Charter of the United Nations that impedes the full achievement of economic and social development by the population of the affected countries, and that hinders the well-being of their population.</p>	<p>46.Dalam membangun masyarakat informasi, negara sangat didorong untuk mengambil langkah dengan pandangan untuk menghindari dan menahan diri dari berbagai langkah unilateral yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB yang menghalangi pencapaian penuh perkembangan ekonomi dan sosial oleh penduduk negara yang terkena pengaruh, dan yang menghalangi kesejahteraan penduduknya.</p>
<p>47.Recognizing that ICTs are progressively changing our working practices, the creation of a secure, safe and healthy working environment, appropriate to the utilisation of ICTs, respecting all relevant international norms, is fundamental.</p>	<p>47.Menimbang bahwa TIK mengubah secara progresif praktik kerja kita, penciptaan lingkungan kerja yang terjamin, aman dan sehat, sesuai dengan pemanfaatan TIK yang menghormati norma internasional yang sesuai, adalah hal yang mendasar.</p>
<p>48.The Internet has evolved into a global facility available to the public and its governance should</p>	<p>48.Internet telah berkembang menjadi fasilitas global yang tersedia untuk umum dan pemeliharaannya</p>

constitute a core issue of the Information Society agenda. The international management of the Internet should be multilateral, transparent and democratic, with the full involvement of governments, the private sector, civil society and international organizations. It should ensure an equitable distribution of resources, facilitate access for all and ensure a stable and secure functioning of the Internet, taking into account multilingualism.

49. The management of the Internet encompasses both technical and public policy issues and should involve all stakeholders and relevant intergovernmental and international organizations. In this respect it is recognized that:

- a. Policy authority for Internet-related public policy issues is the sovereign right of States. They have rights and responsibilities for international Internet-related public policy issues;
- b. The private sector has had and should continue to have an important role in the development of the Internet, both in the technical and economic fields;
- c. Civil society has also played an important role on Internet matters, especially at community level, and should continue to play such a role;
- d. Intergovernmental organizations have had and

harus mengandung isu pokok dari agenda Masyarakat Infor-masi. Manajemen internet secara internasional harus bersifat multilateral, transparan dan demokrasi dengan melibatkan secara penuh pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan organisasi internasional. Harus menjamin distribusi sumber daya yang merata, memfasilitasi akses bagi semua dan menjamin berfungsinya internet secara tetap dan aman, mempertimbangkan banyak bahasa.

49. Manajemen internet mencakup teknik dan masalah kebijakan publik dan harus melibatkan semua pihak berkepentingan dan organisasi antar pemerintah dan internasional yang relevan. Dalam hal ini diakui bahwa :

- a. Otoritas kebijakan untuk isu kebijakan publik yang terkait dengan internet adalah hak kekuasaan suatu negara. Mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk isu kebijakan publik terkait dengan internet secara internasional;
- b. Sektor swasta telah dan harus terus berperan penting dalam pengembangan internet, baik dari segi teknik maupun ekonomi;
- c. Masyarakat sipil juga telah memainkan peranan penting di bidang internet, terutama di tingkat masyarakat, dan harus meneruskan peran itu;
- d. Organisasi antar pemerintah telah mempunyai peran

should continue to have a facilitating role in the coordination of Internet-related public policy issues;

- e. International organizations have also had and should continue to have an important role in the development of Internet-related technical standards and relevant policies.

50. International Internet governance issues should be addressed in a coordinated manner. We ask the Secretary-General of the United Nations to set up a working group on Internet governance, in an open and inclusive process that ensures a mechanism for the full and active participation of governments, the private sector and civil society from both developing and developed countries, involving relevant intergovernmental and international organizations and forums, to investigate and make proposals for action, as appropriate, on the governance of Internet by 2005.

**7) ICT applications: benefits in all aspects of life**

51. The usage and deployment of ICTs should seek to create benefits in all aspects of our daily life. ICT applications are potentially important in government operations and services, health care and health information, education and training, employment, job creation, business, agriculture,

memfasilitasi dalam koordinasi isu kebijakan publik yang terkait dengan internet, dan peran ini harus diteruskan;

- e. Organisasi internasional juga punya peran penting dalam mengembangkan standar teknik yang berhubungan dengan internet dan kebijakan yang relevan, dan peran ini harus diteruskan.

50. Isu pengaturan internet secara internasional hendaknya dilakukan secara terkoordinasi. Kami meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menyusun kelompok kerja tentang pengaturan internet dengan proses yang terbuka dan inklusif yang menjamin suatu mekanisme untuk partisipasi aktif dan penuh oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil negara berkembang maupun negara maju yang melibatkan organisasi antar pemerintah dan internasional dan berbagai forum untuk menyelidiki dan membuat proposal kegiatan yang sesuai dalam pengaturan internet pada tahun 2005.

**7) Penerapan TIK: manfaat di semua aspek kehidupan**

51. Penggunaan dan pendayagunaan TIK harus dilakukan untuk menciptakan manfaat di semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Penerapan TIK berpotensi penting dalam kerja dan layanan pemerintah, pemeliharaan dan informasi kesehatan, pendidikan dan pelatihan, pekerjaan,

transport, protection of environment and management of natural resources, disaster prevention, and culture, and to promote eradication of poverty and other agreed development goals. ICTs should also contribute to sustainable production and consumption patterns and reduce traditional barriers, providing an opportunity for all to access local and global markets in a more equitable manner. Applications should be user-friendly, accessible to all, affordable, adapted to local needs in languages and cultures, and support sustainable development. To this effect, local authorities should play a major role in the provision of ICT services for the benefit of their populations.

**8) Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content**

52. Cultural diversity is the common heritage of humankind. The Information Society should be founded on and stimulate respect for cultural identity, cultural and linguistic diversity, traditions and religions, and foster dialogue among cultures and civilizations. The promotion, affirmation and preservation of diverse cultural identities and languages as reflected in relevant agreed United Nations documents including UNESCO's Universal Declaration

penciptaan lapangan kerja, bisnis, pertanian, transportasi, perlindungan lingkungan dan manajemen sumber daya alam, pencegahan bencana, dan budaya, serta untuk penghapusan kemiskinan dan tujuan pembangunan lainnya yang telah disepakati. TIK harus mendukung produksi berkelanjutan dan pola konsumsi serta mengurangi kendala tradisional, memberikan kesempatan kepada semua untuk akses pasar secara lokal maupun global secara lebih adil. Penerapan tersebut harus ramah bagi pemakai, dapat diakses oleh semua, terjangkau, sesuai dengan kebutuhan lokal dalam bahasa dan budaya, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk semua ini, otoritas lokal harus memainkan suatu peran penting dalam menyediakan layanan TIK untuk kemaslahatan masyarakatnya.

**8) Keragaman budaya dan identitas, keragaman bahasa dan muatan lokal**

52. Keragaman budaya merupakan warisan manusia pada umumnya. Masyarakat informasi harus dibangun di atas dan merangsang identitas budaya, keragaman budaya dan bahasa, tradisi dan agama, serta membina dialog antar budaya dan peradaban. Promosi, penegasan dan pelestarian identitas budaya dan bahasa yang beragam seperti tertera dalam dokumen PBB yang telah disepakati, termasuk Deklarasi Universal UNESCO tentang kera-

on Cultural Diversity, will further enrich the Information Society.

53. The creation, dissemination and preservation of content in diverse languages and formats must be accorded high priority in building an inclusive Information Society, paying particular attention to the diversity of supply of creative work and due recognition of the rights of authors and artists. It is essential to promote the production of and accessibility to all content—educational, scientific, cultural or recreational—in diverse languages and formats. The development of local content suited to domestic or regional needs will encourage social and economic development and will stimulate participation of all stakeholders, including people living in rural, remote and marginal areas.

54. The preservation of cultural heritage is a crucial component of identity and self-understanding of individuals that links a community to its past. The Information Society should harness and preserve cultural heritage for the future by all appropriate methods, including digitisation.

#### 9) Media

55. We reaffirm our commitment to the principles of freedom of the press and freedom of information, as well as those of the independence,

gaman budaya, selanjutnya dapat memperkaya masyarakat informasi.

53. Penciptaan, diseminasi dan pelestarian substansi dalam bahasa dan format yang beragam harus menjadi prioritas utama yang disepakati dalam membangun Masyarakat Informasi inklusif dengan memberi perhatian khusus pada keragaman pasokan karya kreatif dan mengakui hak pengarang dan artis. Penting untuk mempromosikan produksi dan akses substansi pendidikan, ilmiah, budaya atau hiburan dalam bahasa dan format yang beragam. Pembangunan muatan lokal yang sesuai kebutuhan domestik dan regional akan mendorong perkembangan sosial ekonomi dan akan merangsang peran serta seluruh pihak berkepentingan, termasuk masyarakat yang hidup di daerah, daerah pinggiran dan terpencil.

54. Pelestarian warisan budaya merupakan komponen penting dari identitas dan pemahaman diri perorangan yang menghubungkan masyarakat dengan masa lalunya. Masyarakat informasi harus memanfaatkan dan melestarikan warisan budaya untuk masa depan dengan semua metode yang sesuai, termasuk digitasi.

#### 9) Media

55. Kami menegaskan kembali komitmen kami pada prinsip kebebasan pers dan kebebasan informasi, juga dalam hal

pluralism and diversity of media, which are essential to the Information Society. Freedom to seek, receive, impart and use information for the creation, accumulation and dissemination of knowledge are important to the Information Society. We call for the responsible use and treatment of information by the media in accordance with the highest ethical and professional standards. Traditional media in all their forms have an important role in the Information Society and ICTs should play a supportive role in this regard. Diversity of media ownership should be encouraged, in conformity with national law, and taking into account relevant international conventions. We reaffirm the necessity of reducing international imbalances affecting the media, particularly as regards infrastructure, technical resources and the development of human skills.

**10) Ethical dimensions of the Information Society**

56. The Information Society should respect peace and uphold the fundamental values of freedom, equality, solidarity, tolerance, shared responsibility, and respect for nature.

57. We acknowledge the importance of ethics for the Information Society,

kemerdekaan, pluralisme dan media yang beragam, yang menjadi utama bagi Masyarakat Informasi. Kebebasan mencari, menerima, memberi dan menggunakan informasi untuk penciptaan, akumulasi dan penyebaran informasi adalah sangat penting bagi Masyarakat Informasi. Kami menghimbau penggunaan yang bertanggung jawab dan penanganan informasi oleh media memenuhi etika dan standar profesional tertinggi. Media tradisional dalam segala bentuknya memiliki peranan penting dalam Masyarakat Informasi, dan TIK harus memegang peran yang mendukung dalam hal ini. Keragaman kepemilikan media harus didorong, dalam keselarasan dengan hukum nasional, dan dalam kaitannya dengan konvensi internasional yang sesuai. Kami menegaskan kembali perlunya mengurangi ketimpangan internasional yang berpengaruh pada media, khususnya dalam hal infrastruktur, sumber daya teknis dan pengembangan keahlian manusia.

**10) Dimensi etis masyarakat informasi**

56. Masyarakat informasi harus menghormati perdamaian dan menjunjung tinggi nilai dasar kebebasan, persamaan, solidaritas, toleransi, rasa tanggung jawab bersama dan menghormati alam.

57. Kami mengakui kepentingan etika untuk masyarakat informasi yang



which should foster justice, and the dignity and worth of the human person. The widest possible protection should be accorded to the family and to enable it to play its crucial role in society.

58. The use of ICTs and content creation should respect human rights and fundamental freedoms of others, including personal privacy, and the right to freedom of thought, conscience, and religion in conformity with relevant international instruments.

59. All actors in the Information Society should take appropriate actions and preventive measures, as determined by law, against abusive uses of ICTs, such as illegal and other acts motivated by racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance, hatred, violence, all forms of child abuse, including paedophilia and child pornography, and trafficking in, and exploitation of, human beings.

#### **11) International and regional cooperation**

60. We aim at making full use of the opportunities offered by ICTs in our efforts to reach the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, and to uphold the key principles set forth

harus membina keadilan, serta kebanggaan dan nilai pribadi manusia. Kemungkinan perlindungan terbesar harus ditujukan pada keluarga dan memampukannya agar dapat menjalankan perannya yang penting dalam masyarakat.

58. Penggunaan TIK dan penciptaan substansi harus menghormati hak manusia dan kebebasan mendasar dari sesama, termasuk privasi perorangan dan hak dalam kebebasan berpikir, suara hati, dan agama yang sesuai dengan norma internasional.

59. Setiap aktor dalam masyarakat informasi harus bertindak pantas dan melaksanakan pencegahan, sesuai ketentuan hukum, melawan penyalahgunaan TIK, seperti tindakan melawan hukum dan tindakan lain yang bermotifkan rasisme, diskriminasi ras, ketidak-sukaan pada pihak asing, dan ketidaktoleransian terkait, kebencian, kekejaman, semua bentuk kejahatan terhadap anak, termasuk pedofili dan pornografi anak, serta perdagangan dan eksploitasi manusia.

#### **11) Kerja sama internasional dan regional**

60. Kami bermaksud menggunakan sepenuhnya kemampuan TIK dalam usaha kami untuk mencapai tujuan pembangunan yang disepakati, termasuk yang dimaksud dalam Deklarasi Milenium, dan untuk menjunjung tinggi

in this Declaration. The Information Society is intrinsically global in nature and national efforts need to be supported by effective international and regional cooperation among governments, the private sector, civil society and other stakeholders, including the international financial institutions.

61. In order to build an inclusive global Information Society, we will seek and effectively implement concrete international approaches and mechanisms, including financial and technical assistance. Therefore, while appreciating ongoing ICT cooperation through various mechanisms, we invite all stakeholders to commit to the "Digital Solidarity Agenda" set forth in the Plan of Action. We are convinced that the worldwide agreed objective is to contribute to bridge the digital divide, promote access to ICTs, create digital opportunities, and benefit from the potential offered by ICTs for development. We recognize the will expressed by some to create an international voluntary "Digital Solidarity Fund", and by others to undertake studies concerning existing mechanisms and the efficiency and feasibility of such a Fund.

prinsip kunci deklarasi ini. Masyarakat informasi pada hakekatnya berciri global, dan usaha nasional memerlukan dukungan kerja sama regional maupun internasional yang efektif antar pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan pihak berkepentingan lainnya, termasuk institusi keuangan internasional.

61. Dalam rangka membangun suatu masyarakat informasi global yang inklusif, kami mencari dan mengimplementasikan secara efektif pendekatan dan mekanisme internasional nyata, termasuk bantuan keuangan dan teknis. Oleh karena itu, seraya mengapresiasi kerja sama TIK yang sedang berjalan melalui beragam mekanisme, kami mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk terlibat dalam Agenda Solidaritas Digital yang terdapat dalam rencana aksi. Kami yakin bahwa tujuan kesepakatan dunia adalah untuk membantu menjembatani kesenjangan digital, memajukan akses pada TIK, menciptakan peluang digital, dan mendapatkan keuntungan dari potensi yang ditawarkan oleh TIK untuk pembangunan. Kami mengakui kehendak yang dinyatakan beberapa pihak untuk mengembangkan Dana Solidaritas Digital secara internasional dan sukarela, dan oleh pihak lain untuk melakukan studi sehubungan dengan mekanisme yang ada serta keefisienan dan kemungkinan adanya dana.

<p>62. Regional integration contributes to the development of the global Information Society and makes strong cooperation within and among regions indispensable. Regional dialogue should contribute to national capacity building and to the alignment of national strategies with the goals of this Declaration of Principles in a compatible way, while respecting national and regional particularities. In this context, we welcome and encourage the international community to support the ICT-related measures of such initiatives.</p>	<p>62. Integrasi regional menyumbangkan pada pengembangan Masyarakat Informasi global dan membangun kerja sama kuat di dalam dan antar negara yang sangat diperlukan. Dialog regional harus menyumbangkan pada pembangunan kapasitas nasional dan penjabaran strategi nasional yang sesuai dengan sasaran Deklarasi Prinsip ini, seraya menghormati kekhususan nasional dan regional. Dalam konteks ini kami menerima dan mendorong komunitas internasional untuk mendukung langkah terkait TIK dari inisiatif sejenis.</p>
<p>63. We resolve to assist developing countries, LDCs and countries with economies in transition through the mobilization from all sources of financing, the provision of financial and technical assistance and by creating an environment conducive to technology transfer, consistent with the purposes of this Declaration and the Plan of Action.</p>	<p>63. Kami berketetapan hati untuk mendukung negara berkembang, negara kurang berkembang, dan negara dengan perekonomian dalam transisi, melalui mobilisasi dari semua sumber daya pendanaan, penyediaan bantuan keuangan dan teknis dan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif pada alih teknologi konsisten dengan maksud Deklarasi dan Rencana Aksi.</p>
<p>64. The core competences of the International Telecommunication Union (ITU) in the fields of ICTs—assistance in bridging the digital divide, international and regional cooperation, radio spectrum management, standards development and the dissemination of information—are of crucial importance for building the Information Society.</p>	<p>64. Kemampuan inti dari ITU (International Telecommunication Union) dalam lapangan TIK: bantuan dalam menjembatani kesenjangan digital, kerja sama internasional dan regional, manajemen frekuensi radio, pengembangan standar dan penyebaran informasi, adalah sangat penting untuk membangun Masyarakat Informasi.</p>

***C. Towards an Information Society for All Based on Shared Knowledge***

65. **We commit ourselves** to strengthening cooperation to seek common responses to the challenges and to the implementation of the Plan of Action, which will realize the vision of an inclusive Information Society based on the Key Principles incorporated in this Declaration.

66. **We further commit ourselves** to evaluate and follow-up progress in bridging the digital divide, taking into account different levels of development, so as to reach internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, and to assess the effectiveness of investment and international cooperation efforts in building the Information Society.

67. **We are firmly convinced** that we are collectively entering a new era of enormous potential, that of the Information Society and expanded human communication. In this emerging society, information and knowledge can be produced, exchanged, shared and communicated through all the networks of the world. All individuals can soon, if we take the necessary actions, together build a new Information Society based on shared knowledge and founded on global solidarity and a better

***C. Menuju Masyarakat Informasi bagi semua berbasis pada berbagi pengetahuan***

65. Kami menyanggupkan diri kami untuk menguatkan kerja sama guna menemukan jawaban umum atas tantangan dan pelaksanaan rencana aksi yang akan merealisasikan visi tentang Masyarakat Informasi inklusif berbasis prinsip dasar yang dinyatakan dalam deklarasi ini.

66. Lebih lanjut kami menyanggupkan diri untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti perkembangan dalam menjembatani kesenjangan digital, memperhatikan beda tingkat perkembangan, sehingga mencapai tujuan pengembangan yang disepakati secara internasional, termasuk yang dimaksud dalam Deklarasi Milenium, serta mengkaji efektivitas investasi dan kerjasama internasional dalam upaya membangun Masyarakat Informasi.

67. Kami menyadari sepenuhnya bahwa secara bersama memasuki era baru yang berpotensi kuat, yaitu dari Masyarakat Informasi dan perluasan komunikasi manusia. Dalam masyarakat yang baru muncul ini, informasi dan pengetahuan dapat dihasilkan, dipertukarkan, dibagi dan dikomunikasikan melalui semua jaringan dunia. Semua individu dapat segera, apabila kita melakukan tindakan wajib, bersama membangun suatu Masyarakat Informasi baru berbasis pengetahuan

<p>mutual understanding between peoples and nations. We trust that these measures will open the way to the future development of a true knowledge society.</p>	<p>bersama dan dibangun pada solidaritas global dan saling memahami dengan lebih baik antar masyarakat dan bangsa. Kami percaya bahwa usaha ini akan membuka jalan ke masa depan pembangunan dari masyarakat berpengetahuan yang benar.</p>
--	---